

## BAB II

### SEJARAH KONFLIK LAUT CHINA SELATAN

Menurut Biro Hidrografis Internasional (*the International Hydrographic Bureau*) Laut China Selatan didefinisikan sebagai perairan yang memanjang dari barat daya ke arah timur laut, berbatasan di sebelah selatan dengan 3 derajat lintang selatan antara Sumatra dan Kalimantan, di sebelah utara dibatasi oleh Selat Taiwan dari ujung utara Taiwan ke arah pantai Fukien, China. Luas perairan meliputi sekitar 4.000.000 kilometer persegi.<sup>1</sup>

Dasar Laut China Selatan dari 1,7 juta km<sup>2</sup> landas kontinen yang mempunyai kedalaman kurang dari 200 meter, dan 2,3 juta km<sup>2</sup> dari dasar laut lebih dalam dari 200 meter. Dasar laut yang termasuk landas kontinen terutama terdapat di bagian barat dan selatan (*Sunda Shelf*), sementara bagian yang lebih dalam di beberapa area mencapai lebih dari 5000 meter (*South China Basin*), ditandai dengan berbagai kedangkalan dan pulau-pulau karang.<sup>2</sup>

Menurut definisi lain Laut China Selatan merupakan “laut setengah tertutup” (*semi-enclosed sea*) yang berbatasan dengan China dan Taiwan di sebelah utara, di sebelah barat ke arah selatan berbatasan dengan Vietnam, Kamboja, Thailand, dan Malaysia, di sebelah timur berbatasan dengan Filipina, dan di sebelah selatan berbatasan dengan Indonesia dan Malaysia (Serawak dan Sabah). Pusat dari kepulauan ini sekitar 400 km dari Malaysia Serawak, 600 km Saigon (Vietnam),

---

<sup>1</sup> Asnani, Usman & Rizal Sukma. Konflik Laut China Selatan : Tantangan Bagi ASEAN. Jakarta: CSIS, 1997

<sup>2</sup> Ibid

700 km dari Manila, 1.100 km dari China (pulau Hainan) dan 1.600 km dari Indonesia (Pulau Sumatra). Dengan luas wilayah perairan sekitar 3.000.000 km persegi, di wilayah Laut China Selatan ini tersebar beberapa gugus kepulauan, yaitu: (1) gugus kepulauan Pratas, (2) gugus kepulauan Paracel, dan (3) gugus Kepulauan Spratly. Di kawasan ini juga terdapat gugusan karang Scarborough.<sup>3</sup>

Kawasan Laut China Selatan sepanjang dekade 90-an menjadi isu keamanan yang paling sering di sorot. Kawasan ini merupakan wilayah cekungan laut yang dibatasi oleh negara-negara besar dan kecil seperti China, Vietnam, Filipina, Malaysia, Burma, dan Taiwan. Dalam wilayah Laut China Selatan ini terdapat kepulauan Spratly dan kepulauan Paracel. Namun kajian konflik Laut China Selatan di Kepulauan Spratly lebih mengemuka karena melibatkan beberapa negara sekaligus. Konflik Laut China Selatan tidak bisa dilepaskan dari persoalan kebutuhan akan sumber daya yang sangat penting seperti minyak bumi, sumber daya ikan, hingga jalur transportasi kapal-kapal yang ramai. Minyak bumi menjadi incaran utama China karena sejak awal decade 90-an hingga saat ini China telah menjadi salah satu dari sepuluh negara importir terbesar di dunia. Predikat ini secara otomatis China harus selalu berusaha untuk mendapatkan suplai minyak dari luar negeri dalam jumlah yang cukup agar perekonomiannya tetap berjalan dan berkembang. Kandungan Minyak bumi dan gas alam di kawasan ini membuat keterlibatan China dalam konflik Laut China Selatan ini menjadi tak terelakkan.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Ibid

<sup>4</sup> Ibid

## A. Dasar Tuntutan

Tabel Tahun dan Dasar Tuntutan

NO	NEGARA	TAHUN	DASAR TUNTUTAN
1	China	1887	China mengajukan tuntutan berdasarkan catatan sejarah semenjak era Dinasti Han, dan diperjelas pada tahun 1887.
2	Taiwan	1933	Pemerintahan China Nasionalis juga mengajukan tuntutan berdasarkan sejarah semenjak era Dinasti Han, dan diperjelas pada tahun 1933.
3	Vietnam	1802	Vietnam mengajukan tuntutannya atas pulau-pulau Spratly berdasarkan sejarah, yaitu perolehan Kaisar Gia Long tahun 1802 yang kemudian menggabungkannya dengan Vietnam pada tahun 1832
4	Filipina	1946	Dalam sidang Majelis Umum PBB pada tahun 1946, Menlu Filipina mengeluarkan pernyataan bahwa kepulauan Spratly diserahkan Jepang kepada Filipina.
5	Malaysia	1979	Pada tahun 1979, Malaysia mempublikasikan peta Landas Kontinen Malaysia yang didalamnya terdapat sebagian dari pulau-pulau kecil Spratly
6	Brunei	1979	Brunei memprotes isi publikasi peta Landas Kontinen Malaysia pada tahun 1979, dan mengajukan tuntutan atas Louisa Reef sebagai wilayah yang berada di landas kontinen dan ZEE Brunei.

### 1) China

China mengemukakan tuntutannya berdasarkan catatan-catatan sejarah, dokumen-dokumen kuno, peta-peta, dan penggunaan oleh nelayan-nelayannya sejak 2000 tahun yang lalu. Bagi China, Kepulauan Spratly sudah merupakan bagian dari China sejak jaman dinasti-dinasti Han, Yuan, dan Ming. Selain itu, China merujuk pada perjanjian perbatasan antara China dan Perancis tahun 1887

(ketika Vietnam menjadi protektorat Perancis) di mana Kepulauan Parcel dan Spratly diserahkan kepada China.<sup>5</sup>

Sampai pada paruh pertama abad ke-20, China berulang kali menegaskan kedaulatannya atas Kepulauan Spratly dan tidak mendapat tantangan dari negara-negara lainnya. Tetapi pada tahun 1930 Perancis menduduki salah satu Pulau Spratly dan pada tahun 1931 mengirimkan nota kepada Kedutaan China di Paris, menuntut kedaulatan Vietnam atas Kepulauan Spratly (dan Kepulauan Parcel) yang kemudian diprotes oleh China. Tanpa menghiraukan protes ini, Perancis menduduki pulau Spratly dan Itu Aba, serta tujuh pulau lainnya dan menyatakan pulau-pulau itu sebagai bagian dari Kerajaan Vietnam dari tahun 1933 sampai tahun 1939.<sup>6</sup>

Jepang kemudian menggantikan Perancis menduduki pulau-pulau di Spratly dari tahun 1939 sampai tahun 1945. Setelah Jepang kalah dalam Perang Dunia II tahun 1945, Perancis kembali menduduki pulau-pulau Spratly pada tahun 1946. China kembali memprotes tindakan Perancis dan sebulan kemudian mengirimkan pejabat seniornya dengan kapal perang menduduki Spratly. Tahun 1947, China menempatkan pulau-pulau Spratly di bawah yurisdiksinya sebagai bagian dari Provinsi Guangdong. Klaim China terhadap Kepulauan Spratly baru dilontarkan kembali pada tanggal 5 Agustus 1951, yaitu sebelum dilangsungkannya Konferensi Perdamaian San Fransisco bulan September. Menlu China pada waktu itu , Zhou

---

<sup>5</sup> Ibid

<sup>6</sup> Ibid

Enlai, Menegaskan bahwa Kepulauan Spratly selalu merupakan bagian dari wilayah China.<sup>7</sup>

Selain itu China telah mengemukakan tuntutananya atas pulau-pulau di Laut China Selatan sebagai tuntutan sejarah berupa garis Sembilan yang terputus-putus (nine dash-line), yang pada mulanya dibuat oleh pemerintahan Kuo Mintang pada tahun 1947. Tetapi garis-garis terputus ini tidak mempunyai batas-batas yang jelas karena tidak mempunyai koordinat dan definisi yang jelas. Tuntutan ini juga tidak jelas menyatakan apakah yang dituntut itu dalam garis putus-putus tersebut hanyalah pulau-pulau yang terletak di dalamnya ataukah juga seluruh laut yang termasuk ke dalam Sembilan garis-garis terputus tersebut.<sup>8</sup>

## 2) Taiwan

Seperti China, Taiwan juga mengajukan tuntutanya berdasarkan sejarah. Taiwan mengemukakan kepemilikan dan penggunaan wilayah itu oleh Bangsa China sejak masa dinasti Han (mulai sekitar 206 Sm) di samping bukti-bukti dari kekuasaan Dinasti Sung (960-1279) dan Yuan (1282). Pemerintahan China Nasionalis telah mengajukan tuntutananya atas pulau-pulau kecil di Laut China Selatan yang terletak di dalam *nine dash-line* dan yang tidak ada koordinatnya sejak pendudukan Perancis pada tanggal 25 Juli 1933 sampai Jepang berhasil mengusir Perancis dan menduduki Kepulauan Paracel dan Spratly pada tahun 1939. Setelah

---

<sup>7</sup> Ibid

<sup>8</sup> Ibid

Jepang kalah dalam Perang Dunia II, Pemerintah China Nasionalis mengambil-alih kedua Kepulauan tersebut dan menempatkan pasukan di Pulau Itu Aba tahun 1945.<sup>9</sup>

### 3) Vietnam

Seperti halnya China, Vietnam mengajukan tuntutan atas pulau-pulau Spratly berdasarkan sejarah berabad-abad lalu . Klaim Vietnam atas pulau-pulau Spratly juga berdasarkan perolehan Kaisar Gia Long tahun 1892 yang kemudian menggabungkannya dengan Vietnam pada tahun 1832. Kaisar Minh Mang yang memerintah Kerajaan Vietnam pada tahun 1834 juga telah mendirikan pagoda dan tanda batu (stone tablet) di Pulau Spratly.<sup>10</sup>

Menurut Heinzig, dari sudut pandang sejarah, tuntutan Vietnam lebih lemah daripada China karena negara ini mengalami kesulitan untuk membuktikan kesinambungan penguasaan mereka atas negara dan wilayah sejak tahun 211 SM akibat penjajahan China yang kemudian disambung dengan penjajahan Perancis setelah sempat merdeka dalam jangka waktu yang sangat singkat. Tetapi Vietnam mengemukakan bahwa banyak dokumen yang menunjukkan kepemilikan Vietnam atas pulau-pulau Spratly yang telah dimusnahkan oleh China pada waktu negara ini menjajah Vietnam.<sup>11</sup>

Setelah Perang Dunia II, Vietnam mengemukakan dasar tuntutannya dengan merujuk pada Perjanjian Perdamaian San Fransisco 1951. Vietnam yang pada waktu itu hadir dan menandatangani perjanjian ini telah menegaskan tuntutannya

---

<sup>9</sup> Ibid

<sup>10</sup> Ibid

<sup>11</sup> Ibid

atas Kepulauan Spratly seperti yang dinyatakan oleh PM Republik Vietnam, Tran Van Huu bahwa Vietnam menegaskan hak Vietnam atas Kepulauan Spratly dan Parcel, yang selalu menjadi mili Vietnam. Pada Tahun 1956, Vietnam memasukkan Kepulauan Spratly ke dalam Provinsi Phuoc Tuy dengan suatu dekrit tertanggal 22 Oktober 1956.<sup>12</sup>

#### **4) Filipina**

Filipina mulai memperhatikan pulau-pulau Spratly setelah mendapat kemerdekaan dari Amerika Serikat dan mengajukan tuntutan kepemilikan dalam sidang Majelis Umum PBB pada tahun 1946. Setelah merdeka, Menteri Luar Negeri Filipina mengeluarkan pernyataan bahwa the new Southern Islands (istilah Jepang untuk pulau-pulau di Laut China Selatan) diserahkan Jepang kepada Filipina. Tetapi pada tahun 1956, Thimas Cloma, pemilik kapal ikan menemukan dan menduduki sebagian pulau-pulau Spratly yang kemudian disebut Kepulauan Kalayaan sebagai wilayah terra nullius (wilayah yang tidak dimiliki oleh negara manapun). Dalam suratnya kepada Wakil Presiden dan Menteri Luar Negeri Filipina, Carlos Garcia, Cloma menyatakan pendudukannya didasarkan pada penemuan dan pendudukan (discovery and occupation) yang mencakup 33 pulau yang sangat kecil, pulau Spratly dan pulau kecil Amboyna. Filipina juga kemudian mendasarkan tuntutannya kepada doktrin kedekatan (proximity) dan kebutuhan yang mendesak bagi pertahanannya.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Ibid

<sup>13</sup> Ibid

## 5) Malaysia

Tuntutan Malaysia baru dikemukakan pada tanggal 21 Desember 1979 pada waktu dipublikasikannya peta landas Kontinen Malaysia. Malaysia menganggap pulau-pulau yang berada di Landas Kontinen dan ZEE-nya, yaitu Terumbu Layang-layang (Swallow Reef), Matanani (Mariveles Reef), dan Ubi (Dallas Reef) sebagai wilayahnya. Malaysia juga menyatakan bahwa Inggris telah menguasai pulau-pulau tersebut sebagai bagian dari Sabah dan Serawak pada abad ke-18. Menurut sumber lain, di samping pulau-pulau ini, pulau-pulau dan karang-karang Spratly lainnya yang tercantum di dalam peta tersebut adalah Commodore Reef, Amboyna Cay, Southwest Shoal, Ardasier Breakers, Gloucester Breakers, Barque Canada Reef, Lizzie Weber Reef, Northeast Shoal, Glasglow Shoal dan North Viper Shoal.<sup>14</sup>

## 6) Brunei

Meskipun sampai saat ini tidak menduduki satu pulau pun, seperti Malaysia, Brunei telah mengajukan tuntutan atas Louisa Reef sebagai wilayah yang berada di landas Kontinen dan Zee-nya. Brunei telah mengajukan protes terhadap peta yang dikeluarkan oleh Pemerintah Malaysia pada tahun 1979 yang memasukkan Louisa reef yang disebut Terumbu Semarang Barat ke dalam wilayah kedaulatan Malaysia.<sup>15</sup>

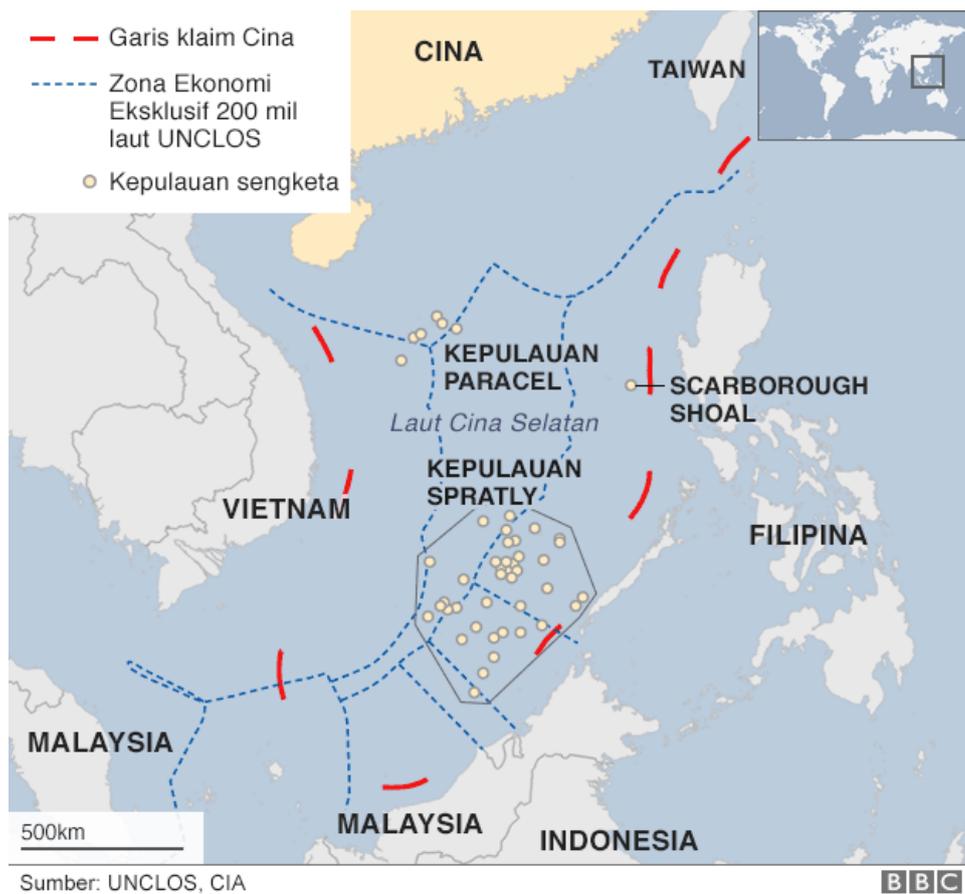
Berdasarkan tuntutan-tuntutan diatas, para penuntut merasa lebih berhak menduduki atau memperluas pendudukan mereka atas pulau-pulau Spratly. Dalam

---

<sup>14</sup> Ibid

<sup>15</sup> Ibid

usaha memperkuat tuntutan mereka, negara-negara pantai tersebut makin memperluas pendudukan atas pulau-pulau Spratly dengan tindakan yang lebih nyata, misalnya menempatkan pasukan, mendirikan bangunan-bangunan, atau menjadikan objek wisata di pulau-pulau yang telah dikuasai, terutama sejak dasawarsa 1970-an.<sup>16</sup>



Sumber Gambar : UNCLOS via BBC Indonesia

<sup>16</sup> Ibid

## **B. Perkembangan Sengketa**

Cina mengklaim sebagian besar kawasan ini terbentang ratusan mil dari selatan sampai timur di Propinsi Hainan. Beijing mengatakan hak mereka atas kawasan itu bermula dari 2.000 tahun lalu dan kawasan Paracel dan Spratly merupakan bagian dari bangsa Cina. Pada Tahun 1947, Cina mengeluarkan peta yang merinci klaim kedaulatan negara itu. Peta itu menunjukkan dua rangkaian pulau yang masuk dalam wilayah mereka. Klaim itu juga diangkat Taiwan, yang masih dianggap Cina sebagai provinsinya yang membangkang. Vietnam menyanggah klaim Cina dengan mengatakan Beijing tidak pernah mengklaim kedaulatan atas kepulauan itu sampai tahun 1940-an dan mengatakan dua kepulauan itu masuk dalam wilayah mereka. Selain itu Vietnam juga mengatakan mereka menguasai Paracel dan Spratly sejak abad ke-17, dan memiliki dokumen sebagai bukti. Negara lain yang mengklaim adalah Filipina, yang mengangkat kedekatan secara geografis ke kepulauan Spratly sebagai landasan klaim sebagian kepulauan itu. Malaysia dan Brunei juga mengklaim sebagian kawasan di Laut Cina Selatan itu yang menurut dua negara itu masuk dalam zone eksklusif ekonomi, seperti yang ditetapkan dalam Konvensi PBB tentang Hukum Laut tahun 1982. Brunei tidak mengklaim dua kepulauan itu namun Malaysia menyatakan sejumlah kecil kawasan di Spratly adalah milik mereka.<sup>17</sup>

Dari semua wilayah Laut China Selatan, kepulauan Spratly merupakan wilayah yang sangat potensial untuk berkembang menjadi wilayah konflik militer

---

<sup>17</sup> Ibid

di masa mendatang, tidak saja karena adanya tuntutan yang tumpang tindih yang melibatkan keenam penuntutnya (China, Taowan, Malaysia, Vietnam, Filipina, dan Brunei) tetapi juga karena kepentingan negara-negara besar seperti Jepang, AS, dan Rusia di perairan Laut China selatan. Keenam negara tersebut mengajukan tuntutan mereka atas kepulauan Spratly antara lain berdasarkan sejarah, penemuan, pendudukan sementara atau berulang, dan pemeliharaan hubungan dengan salah satu pulau sejak berabad-abad lalu. Dasar tuntutan ini menjadi makin rumit dengan adanya pendudukan pulau-pulau Spratly oleh Perancis pada abad 19 dan 20, Jepang pada abad 20. Kekalahan Jepang dan tercapainya Perjanjian Perdamaian Fransisco tahun 1951 yang tidak menyebutkan penyerahan pulau-pulau yang ada di kepulauan Spratly kepada negara-negara sekitarnya, telah menyebabkan China, Vietnam, Filipina, dan Taiwan menuntut bahwa kepulauan Spratly dan Paracel adalah wilayah mereka.<sup>18</sup>

Dari sejarah yang diuraikan sebelumnya, dapat kita lihat bahwa sejak abad 20, penguasaan kepulauan Spratly berpindah-pindah dari satu negara ke negara lainnya. Dimulai dari tahun 1933-1939 diduduki oleh Perancis, di tahun 1939-1945 dikuasai oleh Jepang, dan di tahun 1945-1951 dikuasai sekutu sampai tercapainya Perjanjian Damai San Fransisco. Tetapi perjanjian ini tidak menyebutkan tentang status kepemilikan pulau-pulau yang ada di kepulauan Spratly. Hal ini menyebabkan pada awal dasawarsa 1970-an beberapa negara pantai yang terlibat sengketa mulai memperkuat tuntutan mereka dengan tindakan yang lebih nyata, yaitu dengan menduduki dan mendirikan bangunan di pulau tersebut, menerbitkan

---

<sup>18</sup> Ibid

dokumen-dokumen sejarah yang berkaitan dengan dasar tuntutan, memberikan konsesi minyak kepada perusahaan minyak asing, hingga penempatan pasukan militer di wilayah tersebut.<sup>19</sup>

Negara pertama yang memperkuat tuntutannya dengan mengirimkan pasukan ke pulau-pulau Spratly adalah Vietnam Selatan yang dimulai pada tahun 1973. Menjelang akhir tahun tersebut, Vietnam Selatan mengumumkan secara resmi digabungkannya 11 pulau Spratly dan provinsi Phuoc Tuy. Pada bulan Februari 1974, Vietnam menduduki 6 pulau Spratly, menyusul pendudukan China atas kepulauan Paracel pada Januari 1974. Sumber lain mengungkapkan bahwa Vietnam Selatan telah mengirimkan armada lautnya ke pulau-pulau Spratly tersebut lebih awal, yaitu pada tahun 1956 dan tetap tinggal di pulau-pulau tersebut sampai Hanoi menguasainya setelah Saigon jatuh pada tahun 1975. Setelah Vietnam bersatu pada tahun 1976, Hanoi memperluas penguasaannya dengan menduduki tujuh pulau Spratly lainnya, dan membangun instalasi militer paling sedikit di lima pulau.<sup>20</sup>

Filipina mengajukan tuntutan berdasarkan penemuan Cloma, pada tahun 1970-1971, dan telah menduduki tiga pulau, di antaranya Comodore Reef. Pada bulan Februari 1974 Filipina menduduki lagi lima pulau, yaitu Nanshan, Flat, West York, Northeast Cay, dan Thitu. Pada tahun 1978 Filipina menduduki dua pulau, yaitu Lamkiam Cay dan Pulau Loalita. Pendudukan ini diperkuat dengan tindakan yuridis, yaitu ketika pada tanggal 19 Juni 1978 Presiden Marcos menandatangani Dekrit Presiden 1956 yang menuntut kepemilikan atas Kepulauan Kalayaan.

---

<sup>19</sup> Ibid

<sup>20</sup> Ibid

Menurut dekrit ini pulau-pulau yang dituntut Filipina sama dengan tuntutan Cloma, tetapi Pulau Spratly dan Pulau Amboyna tidak termasuk didalamnya. Kedua pulau ini diduduki Vietnam sebagai bagian dari wilayahnya. Malaysia juga menuntut gugusan karang Laksamana (Commodore Reef) yang diduduki Filipina sebagai bagian dari wilayahnya. Tuntutan-tuntutan ini tidak diikuti dengan penempatan pasukan dan kekuatan militer.<sup>21</sup>

Sementara itu, China setelah menguasai Kepulauan Paracel tahun 1974, tidak melangkah lebih jauh menduduki pulau-pulau Spratly. Menurut salah satu sumber, China sebenarnya mencoba untuk menguasai Pulau Spratly, tetapi tidak berhasil karena dapat diusir oleh pasukan Vietnam Selatan di pulau tersebut. Tindakan negara-negara pantai yang memperkuat tuntutannya di atas, erat kaitannya dengan krisis minyak di dunia pada 1973, yang menyadarkan negara-negara pantai akan potensi minyak yang terkandung di lepas pantai atau dasar laut Kepulauan Spratly. Misalnya, tindakan China yang menduduki Kepulauan Paracel tahun 1974 menimbulkan kekhawatiran negara-negara pantai lainnya bahwa China akan bertindak lebih jauh menduduki Kepulauan Spratly. Oleh karena itu, negara-negara pantai lainnya berusaha untuk mempertahankan dan memperkuat tuntutan mereka.<sup>22</sup>

Pada dasawarsa 1980-an, negara-negara penuntut lainnya tampak tidak melakukan hal-hal yang menimbulkan ketegangan di kawasan Laut China Selatan. Tetapi pada akhir dasawarsa 1980-an timbul perkembangan yang mengkhawatirkan

---

<sup>21</sup> Ibid

<sup>22</sup> Ibid

di perairan Laut China Selatan sehubungan dengan tindakan negara-negara pantai yang memperkuat tuntutan mereka. Kekhawatiran ini muncul ketika terjadi peningkatan kegiatan angkatan laut China di perairan Laut China Selatan pada tahun 1986 yang berlanjut pada tahun 1987. China mulai dengan latihan-latihan armada laut dan amfibi modern untuk menunjukkan bahwa China mempunyai kemampuan melakukan pertempuran dan pantai daratan.<sup>23</sup>

Perkembangan tersebut telah memancing reaksi dari negara-negara pantai lainnya. Malaysia, misalnya pada bulan November 1986 menempatkan pasukannya di pulau Matanani dan Ubi. Beberapa bulan kemudian pada bulan April 1987, Vietnam menduduki sebuah pulau baru yang disebut Barque Canada Reef (Thu Yen Chin). Pada tahun itu, ketika China membangun pangkalan tetap yang pertama di Fiery Cross Reef (youphu), Vietnam menduduki empat pulau lainnya. Tindakan ini dibalas lagi oleh China dengan menduduki empat pulau lainnya. Tindakan ini dibalas lagi oleh China dengan menduduki beberapa pulau lainnya untuk melindungi pangkalan tersebut. Puncak dari perkembangan ini adalah terjadinya bentrokan senjata antara angkatan Laut China dan Vietnam pada Maret 1988. Walaupun sulit untuk mengetahui siapa yang sebenarnya terlebih dahulu membuka tembakan, banyak pengamat percaya bahwa China telah melakukan provokasi terhadap Vietnam sehingga insiden itu terjadi. China telah melakukan hal ini dengan perhitungan bahwa Uni Soviet tidak akan membantu Vietnam sehubungan dengan membaiknya hubungan China dengan Soviet. Tindakan China ini juga disebabkan oleh peningkatan kemampuan angkatan lautnya yang antara lain

---

<sup>23</sup> Ibid

bertujuan untuk mendukung dan merealisasikan tuntutannya atas pulau-pulau Spratly. Saat itu China mempunyai kekuatan kapal selam terbesar ketiga di dunia setelah Amerika Serikat dan Uni Soviet. Kekuatan kapal selamnya tahun 1987-1988 mencapai 117 buah. Dari seluruh kemampuan Angkatan Lautnya, China telah mendapatkan armada laut selatannya yang berjumlah 600 kapal yang berpangkalan di Zhanjiang. Pada tahun 1977-1978, China hanya menempatkan 200 kapal di bagian selatan ini.<sup>24</sup>

Pada bulan Mei 1988 timbul ketegangan antara Malaysia dan Filipina. Angkatan Laut Malaysia telah menangkap 49 awak kapal ikan Filipina karena dituduh menangkap ikan di perairan wilayahnya di lepas pantai Serawak 120 mil barat laut kota Kinabalu. Awak kapal Filipina menyangkal tuduhan ini dan mengemukakan bahwa mereka menangkap ikan di perairan wilayahnya sesuai dekret Presiden tahun 1956 yang menyatakan kelompok kepulauan Kalayaan adalah bagian dari wilayah Filipina. Masalah ini dapat diselesaikan dengan damai antara kedua negara dengan dilepasnya awak kapal ikan yang tertangkap. Walaupun demikian, peristiwa ini disusul dengan peningkatan pasukan kedua negara di pulau-pulau yang dianggap wilayah mereka yang menunjukkan bahwa mereka siap mempertahankan tuntutan mereka masing-masing.

Pada tahun 1989 negara-negara pantai terus merealisasikan tuntutan mereka. Misalnya, China mengirimkan armada khusus untuk menduduki lima pulau Spratly, yaitu Fiery Cross Reef, Cuateron Reef, Gaven Reef, Gac Ma Reef, dan Subi Reef.

---

<sup>24</sup> Ibid

Vietnam telah menduduki sebagian besar pulau-pulau Spratly, yaitu Amboyna Cay, Owen Soal, Ladd Reef, Rifleman Bank, Spratly, Central London Reef, Pearson Reef, Nam Yit, Sand Cay, Union Bank (atoll), Southwest Cay, dan Barque Canada Reef. Taiwan masih tetap menduduki satu pulau yaitu Itu Aba. Filipina menduduki Commodore Reef, Pannata, Thitu, North East Cay, Loaita, Nanshan, West York, dan Flat. Malaysia menduduki Swallow Reef, Mariveles Reef, dan Dallas Reef. Brunei pada tahun tersebut tidak menduduki satu pulau pun.<sup>25</sup>

Sengketa kawasan di Laut China Selatan pada awal dasawarsa 1990-an kembali menghangat. Negara-negara pantai yang berbatasan langsung dengan Laut China Selatan telah mengadakan tindakan-tindakan lebih lanjut dalam merealisasikan dan mempertahankan tuntutannya atas Kepulauan Spratly. Pada bulan November 1990, Angkatan Udara Filipina mengadakan latihan militer di pulau-pulau yang disebutnya Kepulauan Kalayaan untuk menguji kesiapan negara mempertahankan wilayahnya. Peristiwa ini disusul oleh peringatan China terhadap Vietnam untuk menarik mundur pasukannya dari pulau-pulau dan karang-karang dari pulau Nansha yang didudukinya secara tidak sah. Peringatan ini merupakan tanggapan terhadap pernyataan tuntutan Menteri Luar Negeri Vietnam yang mengemukakan bahwa kepulauan Spratly dan Paracel adalah milik Vietnam.<sup>26</sup>

Pada tahun 1991, timbul kembali serangkaian pernyataan-pernyataan dan tindakan-tindakan dalam usaha mempertahankan tuntutan atas Kepulauan Spratly dari salah satu pihak yang ditanggapi dan diprotes oleh pihak lainnya. Misalnya

---

<sup>25</sup> Ibid

<sup>26</sup> Ibid

China, seperti yang diberitakan oleh surat kabarnya *China Youth News* telah memutuskan untuk menggunakan kapal selam di Laut China Selatan untuk memperkuat kemampuan tempurnya di sekitar Kepulauan Spratly. Rencana China itu sempat mengundang reaksi keras dari Vietnam dan Malaysia. Vietnam mengutuk rencana China tersebut sebagai *violation against Southeast Asian countries' will*. Tanpa menyebut nama China Langsung, Wakil Perdana Menteri Malaysia, Ghafar Baba, memperingatkan bahwa negara-negara Asia diharap tidak mengadakan latihan militer di wilayah yang dipersengketakan. China menanggapi pernyataan ini dengan mengemukakan pendapat bahwa kedaulatan Beijing terhadap Kepulauan Spratly tidak dapat diperdebatkan. Dengan kata lain pernyataan ini menegaskan bahwa Kepulauan Spratly adalah wilayah kedaulatan China.<sup>27</sup>

Sementara itu pada bulan Juni 1991 pemerintah Malaysia telah mengembangkan beberapa fasilitas turis di pulau terumbu karang Layang-layang (Swallow Reef). Kemudian pada bulan September Malaysia kembali menyatakan akan membangun pangkalan udara di pulau yang dituntutnya untuk mempercepat pembangunan. Sehubungan dengan pembangunan landasan terbang ini, Menteri Pertahanan Malaysia, Datuk Sri Najib Tun Abdul Razak menyatakan bahwa “pangkalan udara, untuk melayani pesawat militer ringan yang kecil, akan mendukung pengaturan keamanan di pulau di samping membawa turis dan keuntungan ekonomi lainnya.”<sup>28</sup>

---

<sup>27</sup> Ibid

<sup>28</sup> Ibid

Pada tahun 1992, negara-negara pantai di atas terus membuat pernyataan-pernyataan tentang kedaulatannya di pulau-pulau Spratly dan melaksanakan pembangunan di pulau-pulau yang mereka duduki. Misalnya pada bulan Januari 1992, Menteri Luar Negeri Malaysia Abdullah Ahmad Badawi mengumumkan bahwa Vietnam dan Malaysia menyetujui untuk bekerja sama dalam membangun pulau-pulau yang ada di Kepulauan Spratly, tetapi kerja sama tersebut akan dibatasi pada wilayah tumpang tindih yang dituntut oleh kedua negara. Persetujuan ini ditegaskan oleh Perdana Menteri Vietnam, Vo Van Kiet ketika mengunjungi Malaysia, bahwa kedua negara telah menyelesaikan sengketa territorial yang meliputi wilayah tumpang tindih kedua negara. China memberi reaksi keras terhadap persetujuan Malaysia dan Vietnam dan menegaskan bahwa Beijing mempunyai kedaulatan yang tidak dapat dibantah atas Pulau Nansha dan diharapkan pihak-pihak yang lainnya dapat menahan diri untuk tidak melakukan sesuatu yang dapat memperburuk dan memperumit situasi. Menghadapi perkembangan ini, menteri Luar negeri Filipina, Raul Manglapus, pada tanggal 24 Januari 1992 menegaskan bahwa Filipina akan memelihara kehadiran militernya di pulau-pulau Spratly yang didudukinya.<sup>29</sup>

Kekhawatiran China bahwa negara-negara pantai lainnya akan bertindak lebih jauh dalam mempertahankan dan merealisasikan tuntutannya telah mendorong China untuk melakukan tindakan-tindakan yang lebih nyata dan tegas. Pada akhir 1992, China mensahkan Undang-Undang mengenai Perairan Territorial dan Zona Tambahan (*The Law of the People's Republic of China on Its Territorial Waters*

---

<sup>29</sup> Ibid

*and Contiguous Zone/Zhonghua Renmin Gungheguo Linghai Ji Bidaqu Fa*). Secara jelas di Pasal 2 dari Undang-Undang ini bahwa China akan menerapkan Undang-Undang Perairan Teritorial dan Zona Tambahan pada pulau-pulau Spratly, akan menjadi perairan territorial China, sehingga tidak lagi terbuka bagi lalu lintas pelayaran internasional secara bebas. Hal ini tentu sulit diterima oleh negara-negara lain, terutama negara-negara besar yang mempunyai kepentingan pelayaran bagi kapal-kapal mereka, baik kapal niaga maupun kapal perang. Lebih jauh hal tersebut tentu tidak akan diterima oleh negara-negara pantai lainnya yang telah menguasai sebagian Kepulauan Spratly.<sup>30</sup>

Menyusul pengesahan undang-undang tersebut, China telah menandatangani persetujuan dengan perusahaan minyak AS di Colorado, Creston Energy Company pada bulan Mei 1992. China bahkan telah mengemukakan jamina keamanan operasi perusahaan minyak tersebut dengan perlindungan Angkatan Laut China bilamana diperlukan. Menurut China, persetujuan itu merupakan tindakan balasan terhadap Vietnam yang dicurigai telah menduduki lebih banyak pulau-pulau Spratly. Vietnam juga menuduh China telah mengirim pasukannya untuk menempatkan tanda-tanda di sebuah karang yang disebut Da Lac Reef. Seminggu kemudian kembali Vietnam menuduh China menduduki pulau yang disebut Da Ba Dau. Perkembangan lain adalah insiden antara China dan Vietnam. Pada bulan Februari 1993, Vietnam telah memprotes China karena kapal survey China telah berlayar di sekitar 20 mil laut dari pantai Danang. Kemudian pada bulan Mei 1993, terjadi bentrokan antara tiga kapal Vietnam dengan kapal eksplorasi China,

---

<sup>30</sup> Ibid

Fendon-4, di sebelah tenggara pangkalan minyak Vung Tau di lepas pantai Vietnam. China menegaskan bahwa kehadiran kapal eksplorasinya tersebut sah dan menuduh justru kapal Vietnam melanggar wilayah kedaulatan China.<sup>31</sup>

Demikian pula pada tahun 1994, timbul lagi ketegangan antara Vietnam dan china. Pada bulan Juli 1994 China dilaporkan mengirimkan dua kapal perang untuk memblokade tempat pengeboran minyak Vietnam di area Tu Chinh, sekitar 400 km sebelah timur pantai Vietnam karena menganggap area tersebut sebagai wilayah China. China telah memberikan hak eksplorasi minyak di area Tu Chinh kepada beberapa perusahaan minyak asing antara lain Atlantic Richfield Corporation (ARCO), Mobil Corporation, dan Occidental Petroleum Corporation. Tetapi Vietnam bersikeras bahwa wilayah tersebut adalah miliknya.<sup>32</sup>

Berbagai peristiwa pada dasawarsa 1900-an menunjukkan bahwa China lebih bersikap keras terhadap Vietnam dibandingkan negara-negara penuntut lain. Tidak terdengar timbulnya bentrokan antara China dengan negara-negara ASEAN lainnya, kecuali penangkapan nelayan-nelayan ikan masing-masing negara. Misalnya, pada bulan September 1994, Angkatan Bersenjata Filipina menahan 55 nelayan ikan China yang mencoba untuk membangun tempat tinggal di salah satu pulau yang dituntut Filipina. Sebaliknya, pada bulan Januari 1995 China telah menahan 35 nelayan Filipina selama seminggu di kawasan Kalayaan yang dituntut Filipina.<sup>33</sup>

---

<sup>31</sup> Ibid

<sup>32</sup> Ibid

<sup>33</sup> Ibid

Perkembangan ini mencapai puncaknya ketika pada bulan Februari 1995 timbul peristiwa Mischief Reef. Dalam peristiwa ini Filipina menuduh China telah melanggar hukum internasional dengan menempatkan kapal bersenjata dan mendirikan bangunan di pulau tersebut. China menolak tuduhan tersebut dan mengemukakan bahwa bangunan yang didirikan di Mischief Reef adalah tempat berlindung para nelayannya yang dibangun oleh Departemen Administrasi Perikanan. China juga menyatakan bahwa pendudukan pulau pulau karang tersebut diperintahkan oleh aparat pemerintahan tingkat bawah (*low-level functionaries*) tanpa sepengetahuan pemerintah China. Tetapi para ahli yang melihat foto bangunan tersebut berpendapat bentuknya merupakan suatu pos penjaga yang didirikan di atas pilar beton dengan telepon satelit untuk berkomunikasi, dan bendera China berkibar pada setiap bangunan. Dalam sudut pandang Filipina, maksud pendirian bangunan seperti itu merupakan tanda jelas bahwa China akan menguasai wilayah tersebut dan melakukan pengawasan.<sup>34</sup>

Sebagai reaksi dari tindakan China, pada bulan Maret 1995, Filipina telah menahan 4 kapal ikan China dan 62 warga negara China dekat Hal Moon Shoal, 50 mil laut dari Palawan. Para penangkap ikan ini dituduh antara lain memasuki wilayah dan menangkap ikan secara illegal. Pada tanggal 28 Maret 1995, Filipina mengemukakan bahwa China masih tetap menduduki Mischief Reef. China meminta dilepaskannya kapal-kapal beserta anak buahnya yang tertangkap.

---

<sup>34</sup> Ibid

Peristiwa ini telah menimbulkan ketegangan hubungan kedua negara pada saat itu dan mendorong Filipina untuk meminta dukungan dari ASEAN.<sup>35</sup>

Kekhawatiran Filipina dengan tindakan China makin bertambah setelah sehari sebelum pembicaraan antara kedua negara ditemukan bahwa China telah membangun tanda-tanda baru di Jackson Atoll, Sabina Reef dan Half Moon Reef, sekita 70 Mil Laut dari sebelah barat Palawan. Ketika Menteri Luar Negeri Filipina, Romulo mengetahui kehadiran tanda-tanda baru tersebut, ia kemudian menyatakan bahwa tanda-tanda itu telah disingkirkan dengan segera oleh kapal patrol Angkatan Laut China. Filipina juga menemukan dan menyingkirkan tanda-tanda baru lain yang dibuat China di Pennsylvania Reef, First and Second Thomas Shoals. Atas tindakan Filipina ini, China menyatakan bahwa menyingkirkan tanda-tanda penelitian tidak akan membantu menyelesaikan sengketa dan juga tidak akan menyingkirkan kedaulatan China di sana.<sup>36</sup>

Tindakan China dalam memperkuat tuntutannya di atas telah menimbulkan kekhawatiran tidak saja dari negara-negara pantai yang berbatasan langsung dengan Laut China Selatan, tetapi juga negara-negara besar yang mempunyai berbagai kepentingan ekonomi, strategis dan keamanan. Tindakan-tindakan China yang telah melibatkan kekuatan militer dalam mempertahankan tuntutannya dapat mengarah kepada timbulnya konflik di kawasan Laut China Selatan yang dapat mengancam stabilitas dan perdamaian di kawan ini.<sup>37</sup>

---

<sup>35</sup> Ibid

<sup>36</sup> Ibid

<sup>37</sup> Luhulima, C.P.F.. *Dinamika Asia Tenggara Menuju 2015*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2011

Pada tahun 2002, negar-negara ASEAN bersama-sama dengan China membuat suatu deklarasi tentang perilaku di Laut China Selatan di Tahun 2002 di Pnom Penh, Kamboja dengan mendesak semua negara pengklai, untuk menyelesaikan persengketaan di Laut China Selatan secara Damai. Isi deklarasi tersebut adalah sebagai berikut:

Modalitas, jangkauan dan lokasi dari kerjasama bilateral atau multilateral ini harus disetujui terlebih dahulu oleh pihak-pihak yang bermaksud mengadakan kerjasama itu sebelum pelaksanaannya. Kendatipun *Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea (DoC)* bukan merupakan suatu traktat, juga bukan suatu *code of conduct* yang formal, ia merupakan suatu pernyataan politik untuk mengurangi ketegangan di wilayah ini dan memulai kerjasama. Tetapi, ia juga merupakan suatu persetujuan untuk bekerja menuju suatu *code of conduct* yang formal.<sup>38</sup>

Laut China Selatan memperlihatkan perkembangan yang baru di bulan Agustus 2004, ketika pemerintah Filipina menyatakan bahwa mereka tidak lagi menentang eksplorasi untuk mendapatkan deposit hidrokarbon di perairan Laut China Selatan yang dipersengketakan. Pernyataan ini lalu membuka jalan bagi studi-studi seismic di Laut China Selatan guna mendapatkan daerah-daerah untuk eksplorasi minyak dan gas bumi. Persetujuan ini yang dikenal *Joint Marine Seismic Undertaking (JMSU)* ditandatangani pada kunjungan Presiden Arroyo ke Beijing pada 1-3 September 2001. Ia menyetujui suatu studi selama tiga tahun yang

---

<sup>38</sup> Ibid

dilakukan bersama oleh *Philippine National Oil Company* (PNOC) dan *China National Offshore Oil Corporation* (CNOOC). Pemerintah Filipina menekankan bahwa JMSU dapat diklasifikasi sebagai “*marine scientific research*” dan arena itu dibolehkan oleh paragraph 5 dari DoC.<sup>39</sup>

Beberapa alasan merupakan dasar perubahan sikap politik Filipina yang sebelumnya menentang sikap pemerintah China yang terlalu asertif. Pertama, pemerintah Filipina berpendapat bahwa kenaikan harga minyak bumi yang luar biasa merupakan suatu ancaman bagi keamanan nasional negara itu. Karena perkiraan-perkiraan bahwa harga minyak bumi akan tetap tinggi untuk jangka waktu yang cukup panjang, maka Filipina menganggap perlunya untuk mengeksplorasi dan mengeksploitasi sumber-sumber minyak di wilayah-wilayah sekitarnya. Sejak menjadi Presiden Filipina di tahun 2001, Arroyo membuat peremajaan ekonomi Filipina sebagai program utama pemerintahnya. Pemerintah Arroyo melihat China sebagai suatu *regional economic powerhouse* yang dapat membantu Filipina untuk keluar dari kemunduran ekonominya. *Joint Marine Seismic Undertaking* itu dapat dilihat sekaligus sebagai suatu usaha untuk memperbaiki hubungan Filipina-China yang sangat kaku karena persengketaan di Kepulauan Spratly. Langkah-langkah Filipina ini didukung oleh *status quo* di Laut China Selatan. Untuk sementara memang tidak ada satu kekuatan yang mempunyai kemampuan untuk memaksakan klaimnya secara mutlak atas Laut China Selatan.<sup>40</sup>

---

<sup>39</sup> Ibid

<sup>40</sup> Ibid

Negara satunya yang juga sangat berkepentingan dengan sumber minyak bumi di laut China Selatan adalah Vietnam. Pada 14 Maret 2005 perusahaan-perusahaan minyak Filipina, China, dan Vietnam (*Philippine National Oil Company, China National Offshore Oil Corporation* dan *Vietnam Oil dan Gas Corporation*) menandatangani suatu persetujuan ini, 15 juta dollar AS, yang dibagi sama di antara ketiga pihak, diperuntukkan untuk suatu usaha seismic kelautan bersama di Laut China Selatan. Persetujuan ini berlaku untuk 3 tahun dan mencakup suatu wilayah seluas 143.000 kilometer persegi.<sup>41</sup>

Ketiga pihak dalam persetujuan ini menegaskan bahwa penandatanganan ini tidak akan menggerogoti posisi dasar ketiga pemerintah di laut yang dipersengketakan, melainkan dalam usaha bersama ini mereka membangun suatu wilayah perdamaian, stabilitas, kerjasama sesuai dengan *United Nation's Convention on the Law of the Sea 1982* dan *ASEAN-China Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea* Tahun 2002. Vincente Perez Jr, menteri energy Filipina, menegaskan bahwa penelitian seismic bersama ini hanya akan melibatkan kapal-kapal untuk penelitian seismic, yaitu penelitian untuk menemukan struktur geologi landas kontinen di suatu bagian Laut China Selatan melalui ledakan-ledakan yang dibuat untuk memantau *shock waves* yang mengungkapkan data tentang kemungkinan adanya *reserves* minyak dan gas bumi. Mereka belum akan melakukan *drilling*. Presiden Arroyo menyebut usaha ini suatu

---

<sup>41</sup> Ibid

“terobosan historis” dalam pengembangan wilayah sengketa antara ASEAN dan China menjadi suatu sumber energy di wilayah ini.<sup>42</sup>

Pada 16 November 2001 *China Oilfield Services Limited* (CSOL) dengan kapal eksplorasinya Nanhai 502 telah menyelesaikan misinya sesudah 75 hari dari delapan bulan yang semula diperkirakan diperlukan untuk menyelesaikan eksplorasi pertamanya. Kabel sensor sepanjang 11.000 km telah dapat diletakkan di dasar laut yang mencakup wilayah seluas 140.000 km persegi. Zhu Weilin, wakil presiden *China National Offshore Oil Corporation* (CNOOC) menyatakan bahwa keberhasilan eksplorasi bersama di Laut China Selatan ini hanya dapat dicapai dengan adanya saling kepercayaan antara ketiga negara pengeksplorasi.<sup>43</sup>

Namun, ketika perjanjian ini berakhir pada tahun 2008, dan tidak diperpanjang lagi oleh ketiga negara. Beberapa pengamat mengatakan bahwa JMSU telah menggerogoti kedaulatan negara Filipina dan melanggar konstitusi. Hal ini terutama disebabkan diizinkannya kapal-kapal asing terutama kapal-kapal ekspedisi China untuk melakukan tes seismic di wilayah perairan Filipina.

Pada bulan Juli 2012, China mendirikan sebuah kota di Yongxing Island yang sebelumnya bernama Woody Island, di kepulauan Paracel. Kota ini bernama Sansha, didirikan oleh Pemerintah China untuk mengawasi ratusan ribu mil persegi kawasan laut di Laut China Selatan. Hal ini bisa dilihat dari luas yurisdiksi kota tersebut yang mencapai 750.000 mil laut persegi, yang hamper semuanya adalah wilayah Laut China Selatan. Filipina mengatakan tidak mengenali dan tidak akan

---

<sup>42</sup> Ibid

<sup>43</sup> Ibid

mengakui secara yurisdiksi kota tersebut, dan Vietnam mengecam Tindakan China tersebut karena telah melanggar hukum internasional. Juru bicara Departemen Luar Negeri Filipina Raul Hernandez mengatakan bahwa Filipina prihatin dan memprotes keras tindakan China atas keputusan Beijing mendirikan sebuah garnisun militer di Yongxing. Raul Hernandez menambahkan bahwa Filipina tidak mengakui Kota Sansha dan luas Yurisdiksinya, dan menganggap tindakan China baru-baru ini sebagai tindakan yang tidak pantas. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Vietnam, Luong Thanh Nghi, mengatakan bahwa Vietnam telah menyatakan protes kepada kementerian Luar Negeri China. Luong menambahkan bahwa pembentukan kota Sansha secara jelas telah melanggar hukum Internasional, karena telah melanggar kedaulatan Vietnam atas Kepulauan Paracel dan Spratly.<sup>44</sup>

Pada akhir tahun 2013, Filipina mengatakan akan mengajukan upaya arbitrase internasional dengan harapan dapat menyelesaikan sengketa wilayah di Laut China Selatan. Pejabat-pejabat Departemen Luar Negeri Filipina mengatakan, berdasarkan perjanjian PBB tahun 1982 tentang hukum laut, kedua negara telah menandatangani perjanjian yang memungkinkan Filipina mengajukan arbitrase secara sepihak. Pengajuan arbitrase oleh Filipina itu menyatakan China melanggar UNCLOS, yaitu aturan penunjukkan zona eksklusif ekonomi sebuah negara, yaitu sepanjang 370 kilometer dari garis pantainya. Pengajuan arbitrase itu juga menyebut klaim China yang sudah berabad-abad sebelumnya terhadap hampir seluruh wilayah Laut China Selatan adalah ilegal. Beberapa pakar hukum kelautan menyebut bahwa pengajuan

---

<sup>44</sup> <http://www.dailymail.co.uk/news/article-2178656/China-celebrates-birthday-Sansha-new-city-heart-disputed-South-China-Sea-course-neighbours-werent-invited.html> diakses pada tanggal 12 Oktober 2015

arbitrasi ini bisa dibilang situasi yang aneh. Karena arbitrasi pasti gagal jika satu pihak tidak menyetujui pengajuan arbitrase, maka tidak akan ada kesepakatan. Namun, Filipina bisa mengajukan kasus ini ke pengadilan Arbitrasi dikarenakan lewat prosedur perselisihan di bawah UNCLOS, Filipina bisa mengajukannya meski tidak ada persetujuan dari China. Oleh karena hal tersebut, banyak pengamat yang memperkirakan bahwa China tidak akan mau tunduk kepada hasil arbitrase tersebut.<sup>45</sup>

Atas keputusan Filipina mengajukan persoalan Laut China Selatan ke pengadilan Arbitrasi ini, respon China melalui juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Hong Lei mengatakan bahwa pengajuan yang diajukan oleh Filipina memiliki bukti-bukti yang cacat. Hong Lei juga mengatakan bahwa pengajuan ini bertentangan dengan kesepakatan yang tidak mengikat (Code of Conduct) antara ke-10 negara anggota ASEAN dan China untuk menyelesaikan secara bilateral perselisihan wilayah laut di antara negara-negara itu.<sup>46</sup>

Sejak pertengahan 2014, China memulai reklamasi dan memperluas “Fiery Cross Reef” di tepi barat kepulauan Spratly. Pemerintah China dikabarkan tengah menyelesaikan pembangunan landasan di sebuah pulau buatan di wilayah tersebut. Pulau buatan yang bernama Fiery Cross Reef itu tak lebih dari sekadar sebuah karang ketika China mulai melakukan reklamasi untuk menjadikannya sebuah pulau pada akhir 2014. Kini, hasil citra satelit yang diambil pekan lalu oleh

---

<sup>45</sup> <http://www.voaindonesia.com/content/filipina-akan-ajukan-sengketa-laut-cina-selatan-ke-pbb/1608471.html> diakses pada tanggal 13 Oktober 2015

<sup>46</sup> Ibid

DigitalGlobe dan ditampilkan di situs Center for Strategic and International Studies (CSIS) di Washington DC memperlihatkan sebuah landas pacu sepanjang 3.110 meter yang sudah hampir rampung pembangunannya. Setelah selesai dibangun, landas pacu ini bisa didarati hampir semua jenis pesawat terbang yang dimiliki militer China saat ini, bahkan landasan tersebut mampu menampung pesawat pembom jarak jauh tipe H-6 milik China.<sup>47</sup> Tidak hanya dengan merklamasi Fiery Cross Reef, China juga mereklamasi karang-karang yang ada di sekitar Kepulauan Spratly. Contohnya seperti di Gaven-reef yang terletak di utara Kepulauan Spratly, China mereklamasi karang ini hingga meluas mencapai 115.000 persegi sejak Maret 2014. China juga membangun landasan pacu militer di Johnson South Reef. Landasan tersebut diyakini terlampau pendek untuk tujuan militer strategis. Namun pulau ini menegaskan klaim China terhadap kepulauan Spratly. Melihat aksi China tersebut, Filipina segera mengeluarkan tindakan, pada bulan Februari 2015, pemerintah Filipina kembali melayangkan nota diplomatic yang memprotes China. Penyebabnya adalah langkah pemerintahan China membangun pangkalan di Mischief-Reef yang Cuma terpaut jarak 135 kilometer dari pulau Palawan milik Filipina.<sup>48</sup>

---

<sup>47</sup> [http://internasional.kompas.com/read/2015/04/17/16515421/China.Bangun.Pangkalan.Udara.di.Wilayah.Sengketa.Laut.China.Selatan?utm\\_source=news&utm\\_medium=bpkompas&utm\\_campaign=related](http://internasional.kompas.com/read/2015/04/17/16515421/China.Bangun.Pangkalan.Udara.di.Wilayah.Sengketa.Laut.China.Selatan?utm_source=news&utm_medium=bpkompas&utm_campaign=related) diakses pada tanggal 17 Oktober 2015

<sup>48</sup> <http://www.dw.com/id/pangkalan-militer-cina-di-laut-cina-selatan/g-18292381> diakses pada tanggal 17 Oktober 2015